

**POLITIK PENDIDIKAN PEMERINTAH KOLONIAL BELANDA
DI HINDIA BELANDA TAHUN 1848-1901**

Dewi Salindri*

Abstract: Colonial education politics was policy and practice of the Dutch in education sector. The policy was characterized by gradualism, dualism, strong centralistic control, limited goals of indigenous education, no systematic education planning. The colonial education politics inhibited the development of education in Netherlands India, but was able to bring socio-economic changes.

Keywords: gradualisme, dualisme, konkordansi.

1. Pendahuluan

Politik Pendidikan Pemerintah Kolonial Belanda (yang selanjutnya disingkat PKB) adalah kebijaksanaan atau cara bertindak PKB dalam bidang pendidikan. Penulis membatasi scope temporal tahun 1848 karena pada tahun ini PKB menyediakan anggaran untuk bidang pendidikan. Sedangkan batas akhir penulisan ini adalah tahun 1901 karena Politik Etis mulai diterapkan di Hindia Belanda. Sistem Pendidikan untuk anak-anak pribumi sebelum kedatangan Bangsa-Bangsa Barat sebenarnya sudah mengenal sistem pendidikan yang bersifat tradisional yang pada umumnya diisi dengan pelajaran agama.¹

Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat seperti Portugis, Spanyol dan Belanda membawa pengaruh dalam sistem pendidikan di Hindia Belanda. Portugis mendirikan pendidikan Agama Katholik di Ternate, Tidore dan Bacan. Mereka yakin bahwa perluasan Agama Katholik harus disertai dengan pendidikan, dengan cara mendirikan seminari di Ternate tahun 1536.² Sedangkan Spanyol tidak memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan karena keberadaan mereka yang

* Dosen Jurusan Sejarah, Fakultas Sastra, Universitas Jember.

¹ Hasbullah, *Sejarah Pendidikan di Indonesia* (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1996), hlm., 40.

² Muh Said, *Pendidikan Abad Keduapuluh* (Jakarta : Mutiara, 1981), hlm., 42

sangat singkat di Hindia Belanda, sedangkan Belanda mampu memberikan pengaruh dalam bidang pendidikan pada masa VOC.

Sejak VOC datang ke Hindia Belanda tahun 1602 ternyata menunjukkan perhatiannya dalam bidang pendidikan berkaitan dengan perluasan Agama Kristen Protestan. Hal ini terbukti dengan adanya instruksi pada tahun 1617 untuk Gubernur Jenderal dan "Raad Van Indie" yaitu pertama agar VOC memperkembangkan Agama Katholik melalui sekolah-sekolah yang didirikan dan dibiayai oleh VOC³. Tujuan kedua dari pendirian sekolah-sekolah tersebut karena adanya kebutuhan pendidikan bagi anak-anak mereka di Indonesia dan setelah dewasa nanti mereka dapat melanjutkan pendidikannya ke Belanda. Guru-guru didatangkan dari negeri Belanda dengan tugas memupuk rasa takut terhadap Tuhan, mengajarkan dasar-dasar Agama Kristen, mengajar anak-anak berdoa, bernyanyi dan lain-lain.⁴ Guru diangkat oleh gereja reformasi di Amsterdam dan dikirim ke tanah jajahan. Sistem pengajaran yang diberikan adalah pelajaran individual. Setelah VOC dibubarkan tahun 1799 dan segala kekuasaannya diambil-alih oleh PKB maka usaha-usaha dalam bidang pendidikan menurun karena ketiadaan guru-guru dan pendeta-pendeta.

Pada masa Pemerintahan Dirk Van Hogendorp (1799-1808) usaha dalam bidang pendidikan hanya meneruskan usaha-usaha VOC dan melakukan pengurangan pengajaran keagamaan. Jadi pengajaran yang diberikan lebih bersifat umum (sekuler). Hal ini dilanjutkan pada masa Pemerintahan Herman Willem Daendels (1808-1811) dengan mendirikan sekolah-sekolah berdasarkan Agama Kristen, Sekolah Artileri dan lain-lain. Daendels juga memerintahkan regen-regen di Jawa bagian utara dan timur harus mendirikan sekolah atas biaya sendiri untuk mendidik anak-anak mematuhi adat dan kebiasaan sendiri dan ini adalah suatu tindakan yang tidak merugikan perbendaharaan pemerintah. Masa Pemerintahan Thomas Stamford Raffles (1811-1816) tidak membawa perubahan

³ *Ibid.*, hlm., 43.

⁴ S. Nasution. *Sejarah Pendidikan Indonesia* (Jakarta: Departemen P dan K, 1995), Hlm; 51

dalam bidang pendidikan karena lebih mementingkan perubahan dalam bidang ekonomi, hukum, dan pemerintahan⁵.

Ketika kekuasaan kembali ke tangan PKB, maka pemerintahan diserahkan kepada Komisaris Jenderal (1816-1830) ternyata masih melanjutkan usaha-usaha PKB untuk memperoleh keuntungan dalam bidang perdagangan, namun Gubernur Jenderal Van der Capellen (1819-1823) pada tahun 1820 menginstruksikan kepada regen-regen untuk menyediakan sekolah bagi penduduk, untuk mengajar anak-anak membaca, menulis dan mengenal budi pekerti yang baik. Namun tidak berhasil karena sampai tahun 1849 hanya ada dua sekolah yang didirikan oleh regen yang aktif.

Ketika Sistem Tanam Paksa diterapkan di Hindia Belanda memaksa PKB untuk menambah jumlah sekolah dasar, agar dapat memenuhi kebutuhan tenaga kerja tingkat rendah dengan anggaran yang disediakan pemerintah pada tahun 1848 sebesar £. 25.000. Pada masa Politik Liberal PKB mengalami krisis keuangan akibat perang (Perang Aceh selama 39 tahun dan Perang Belanda-Belgia) dan krisis gula, maka untuk mengurangi beban finansial hanya ada dua jenis sekolah untuk anak-anak pribumi tetapi untuk anak-anak Belanda tidak mengalami perubahan.

Pada masa Politik Etis diperkenalkan Sistem Sekolah Desa (Volkschool) yang didirikan atas dasar kemampuan masyarakat setempat, subsidi serta bimbingan pemerintah. Jadi pada Masa Politik Etis ada perkembangan sekolah dan guru secara vertikal dan horisontal, juga adanya sekolah dasar untuk pribumi yang sama dengan ELS (Europese Lagere School) yaitu HIS (Holland Inlandsche School).

Mencermati perkembangan sistem pendidikan yang sudah ada sejak jaman VOC ternyata sistem ini baru mencapai kelengkapan dalam arti berkelanjutan dan berjenjang pada masa Politik Etis. Kelambanan ini yang menimbulkan

⁵ Sartono Kortodirjo, *Sejarah Nasional Indonesia III* (Jakarta: Departemen P dan K., 1975) hlm., 124

pertanyaan apakah sebab perkembangan sistem pendidikan ini berjalan lambat dan faktor-faktor apa yang menyebabkannya. Selain itu apa dan bagaimana peranan Politik Pendidikan PKB di Hindia Belanda.

2. Cara-Cara Politik Pendidikan PKB

2.1 Gradualisme

Gradualisme dalam sistem pendidikan berarti PKB sangat lambat dalam bidang pendidikan dan membiarkan penduduk di Hindia Belanda dalam keadaan pendidikan yang hampir sama sewaktu mereka datang⁶. Hal ini dapat dibuktikan dengan tindakan VOC sampai pertengahan abad ke-19 tidak ada perubahan yang berarti dalam bidang pendidikan. Alasan lain karena pendidikan di negeri Belanda ditangani gereja, sehingga tidak boleh disebarluaskan di Hindia Belanda⁷. Penyebarluasan pendidikan dianggap akan menggerakkan penduduk untuk melawan monopoli perdagangannya dan akan menimbulkan sentimen keagamaan.

Setelah kekuatan VOC digantikan oleh PKB yang telah menganut Liberalisme maka bidang pendidikan bagi anak-anak Belanda mendapat perhatian, sedangkan anak-anak pribumi kurang diperhatikan. Contoh: anak-anak Belanda memasuki pendidikan menengah sejak tahun 1860 yaitu HBS (Hoogere Burger School) sedangkan anak-anak pribumi baru tahun 1914 yaitu MULO (Meer Uit Gebreid Lagere Onderwijs). Ada beberapa alasan yang menyebabkan PKB melakukan hal tersebut. Pertama pendidikan bagi jutaan murid akan memakan biaya jutaan gulden yang harus disediakan oleh PKB untuk menyediakan sarana dan prasarana pendidikan seperti pembangunan sekolah, tenaga guru, peralatan belajar mengajar dan lain-lain. Oleh karena itu PKB melakukan perbedaan penyediaan dana untuk tiap anak Belanda sebesar £. 33,75, sedangkan bagi tiap anak pribumi 4,5 sen per tahun. Kedua urusan penduduk selama ini diserahkan kepada raja-raja yang memerintah di daerah masing, karena

⁶ S. Nasution, op., cit., hlm., 20.

⁷ Ibid., hlm 21.

PKB tidak ingin mengganggu adat istiadat setempat. Kenyataan menunjukkan raja-raja maupun penduduk tidak menaruh minat dalam bidang pendidikan, kadang-kadang justru timbul kecurigaan terhadap pengaruh budaya barat bagi anak-anak mereka. Ketiga para pejabat di Hindia-Belanda lebih konservatif daripada di Denhag (Belanda), sebab merekalah yang paling menerima akibat langsung apabila muncul protes dikalangan pribumi sebagai akibat perkembangan pendidikan. Keempat PKB berusaha menjaga agar-anak Belanda selalu lebih maju, jika dibandingkan dengan anak-anak pribumi, kelima adanya anggapan bahwa pendidikan yang terlampau banyak untuk penduduk akan membahayakan bagi PKB, karena munculnya elit intelektual tanpa jaminan pekerjaan akan membuat mereka frustrasi dan menjadi ancaman bagi ketertiban negara⁸.

2.2 Dualisme

Dualisme dalam dunia pendidikan di Hindia Belanda berarti ada dua pembagian baik secara rasial maupun sosial, tetapi lebih mengarah pada pembagian rasial. Contohnya pertama sistem pendidikan terbagi dua yaitu sekolah Belanda dengan bahasa pengantar Bahasa Belanda dan sekolah pribumi dengan bahasa pengantar Bahasa Melayu atau bahasa daerah. Jadi anak-anak yang bersekolah di sekolah pribumi tidak dapat memasuki sekolah Belanda, karena perbedaan bahasa pengantar. Kedua, anak-anak dari golongan atas (tingkat sosialnya tinggi) memasuki sekolah Belanda (ELS) kelas satu, sedangkan anak-anak Belanda dari golongan rendah memasuki sekolah Belanda (ELS) bukan kelas satu, pembagian ini juga berlaku untuk anak-anak pribumi yang berada di desa memasuki Sekolah Desa dan anak-anak di kota memasuki Sekolah Kelas Dua.

Alasan penerapan dualisme dalam sistem pendidikan menurut Kat Angelino dalam buku *Koloniale Politiek* (Politik Kolonial) adalah adanya kebutuhan yang berbeda-beda dari berbagai golongan penduduk di Hindia-Belanda artinya ada perbedaan antara anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi.

⁸ Robert van Niel, *Munculnya Elite Modern* (Jakarta : Pustaka Jaya, 1984), hlm.,12.

Pada masa Politik Liberal perekonomian PKB memburuk, berkaitan dengan hal itu pada tahun 1887 W. P. Groenevelt Direktur Pengajaran Agama dan Industri mengajukan usul agar dilakukan reorganisasi sekolah menjadi dua jenis yaitu Sekolah Kelas Satu (Eerste Klasse School) untuk anak-anak pribumi golongan atas yang akan menjadi pegawai dan Sekolah Kelas Dua (Tweede Klasse School) untuk rakyat pada umumnya.

Dua macam sekolah ini diharapkan dapat mengurangi beban finansial PKB, karena sekolah rendah untuk pribumi sebelum reorganisasi tidak disesuaikan dengan kebutuhan penduduk. Contohnya kurikulum yang berlaku di sekolah rendah sama dengan mata pelajaran di Sekolah Guru kecuali Ilmu Mendidik (Paedagogik). Sekolah Kelas Dua mempunyai kurikulum yang sederhana dan harus dijaga agar lebih rendah daripada Sekolah Kelas Satu. Pendidikan harus dikaitkan dengan golongan sosial dan bertujuan untuk lebih menegaskan perbedaan golongan itu. Kurikulum yang sederhana tidak akan mengganggu keadaan sosial, karena tidak memungkinkan mobilitas sosial. Kemungkinan memperluas kurikulum Sekolah Kelas Dua dari tiga tahun menjadi lima tahun tidak dapat menyamai Sekolah Kelas Satu karena guru-guru yang berwenang menjadi Kepala Sekolah Kelas Dua mencari tempat di Sekolah Kelas Satu. Hal ini mengakibatkan Kepala Sekolah Kelas Dua sering dipegang oleh guru bantu. Perbedaan ini semakin jelas dengan dijadikannya Bahasa Belanda sebagai mata pelajaran Sekolah Kelas Satu semakin menunjukkan perbedaan dua sekolah ini. Bahasa Belanda yang tidak diajarkan di Sekolah Kelas Dua merupakan halangan untuk melanjutkan pelajaran ke jenjang berikutnya.

Dualisme sistem pendidikan PKB juga tampak pada Masa Politik Etis dimana sekolah-sekolah yang berorientasi barat diciptakan bagi orang-orang Cina dan Indonesia. Namun pada masa ini pula perkembangan pendidikan secara horizontal dan vertikal ditandai dengan berdirinya MULO dan AMS yang memungkinkan anak-anak pribumi yang mampu dapat melanjutkan pendidikannya ke perguruan tinggi. Secara rasial sistem pendidikan masih

memisahkan sekolah-sekolah atas kemampuan dan kedudukan orang tua murid. Hal ini menimbulkan anggapan bahwa sekolah adalah alat untuk memasuki lingkungan hidup baru (golongan priyayi) bagi golongan bawah, sedangkan bagi golongan atas sekolah dianggap sebagai alat penambah dasar legitimasi⁹.

2.3 Kontrol Sentral yang Kuat

Kontrol sentral yang kuat berarti perubahan dibidang pendidikan tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama PKB. Pemerintah memainkan peranan penting dalam segala masalah pendidikan yang dilaksanakan oleh Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan.

Sebelum mengambil keputusan Gubernur Jenderal biasanya meminta keterangan yang diperlukan dari direktur/departemen yang bersangkutan seperti Direktur Pendidikan dan Agama yang juga akan meminta keterangan terperinci dari para inspektur atau suatu panitia khusus untuk memperoleh gambaran yang teliti dan nyata tentang suatu masalah. Kemudian ia akan mengirimkan informasi itu kepada Gubernur Jenderal beserta pandangan dan saran-sarannya. Gubernur Jenderal akan mengirim semua keterangan kepada Dewan Hindia Belanda (Raad Van Indie) untuk menerima saran dan kemudian menyerahkan masalah itu kepada Menteri Jajahan yang akan mengambil keputusan akhir tentang apa yang akan dilakukan. Hal ini berarti guru-guru dan orang tua tidak mempunyai pengaruh langsung karena pendidikan dikontrol secara sentral baik mengenai jumlah sekolah, kurikulum, buku pelajaran, pengangkatan guru, dan jenis sekolah ditentukan oleh pemerintah pusat.

2.4 Pendidikan Sebagai Penyediaan Pegawai

PKB mendirikan sekolah pertama kali untuk anak-anak Aristokrat agar menjadi pegawai di perkebunan pemerintah pada Masa Tanam Paksa. Para Residen juga

⁹ Sartono Kartodjo, *op. cit.*, hlm., 124.

mengadakan usaha perseorangan dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk mendidik tenaga kerja pribumi yang diambil dari anak-anak orang terkemuka setempat. Pendidikan ini bertujuan untuk mengisi jabatan-jabatan dalam pemerintahan terutama di kantor residen. Contoh: J.C. Ellinghuijsen (Pasuruan) tahun 1835 dan Valck (Karawang) tahun 1824¹⁰.

Keputusan PKB tentang adanya lowongan bagi keluarga priyayi berdasarkan undang-undang tahun 1854 artikel 69 dengan syarat mempunyai kecakapan, kejujuran dan loyalitas¹¹. Oleh karena itu didirikan "Sekolah Dokter Jawa" yang ditujukan untuk mendidik mantri cacar bagi anak negeri pada tahun 1851, sedangkan Sekolah Kelas Dua untuk mendidik calon-calon pegawai tingkat rendah. Sekolah Kelas Satu untuk mendidik anak-anak dari golongan masyarakat kelas satu, sedangkan sekolah rendah untuk mendidik anak-anak pribumi¹².

Pada tahun 1864 ditetapkan Klein Ambtenaars Examen, ujian pegawai rendah yang harus ditempuh dengan baik agar dapat diangkat sebagai pegawai pemerintah, sehingga perluasan pendidikan sebagian besar ditentukan oleh kebutuhan pegawai dan juru tulis meningkat¹³. Kebutuhan pegawai yang berpendidikan menyebabkan perluasan pendidikan secara vertikal, namun produksi berlebihan harus dicegah agar tidak menimbulkan bahaya politik dan sosial.

Dengan tersedianya sarana pendidikan tersebut diatas maka lahirlah kaum intelektual yang berorientasi barat di Jawa yang mula-mula lahir dari lingkungan priyayi khususnya keluarga bupati. Contoh: P.A.A. Achmad Djajadiningrat (Bupati Serang), R.M.T. Koesoemo Oetaya (Bupati Ngawi).

2.5 Prinsip Konkordansi

¹⁰ Heather Sutherland, *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi* (Jakarta: Sinar Harapan, 1970), hlm., 52.

¹¹ S. Nasution, *op. cit.*, hlm., 8.

¹² Sartono Kartodirdjo, *loc. cit.*

¹³ S. Nasution, *op. cit.*, hlm., 29

Prinsip konkordansi bertujuan untuk menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standart yang sama dengan sekolah-sekolah di Belanda. Tujuan prinsip ini adalah untuk mempermudah perpindahan murid-murid dari Hindia Belanda ke sekolah-sekolah di Belanda bagi anak-anak Belanda yang mengikuti orangtuanya. Apabila orangtuanya mendapat cuti atau pensiun maka mereka dapat pindah dengan mudah ke sekolah-sekolah di Belanda yang setara dengan di Hindia Belanda.

Prinsip konkordansi menurut Kat Angelino menjamin secara mutlak standart pendidikan yang sama antara Hindia Belanda dan Belanda. Prinsip ini diharapkan dapat mencegah merosotnya taraf pendidikan seperti yang terjadi di India, Inggris, Indocina, Perancis, dan Pilipina, karena prinsip konkordansi dengan negara asal tidak ada. Contoh lain ketika ELS dibuka di Jakarta dan dikota-kota lain di Jawa tahun 1817 maka PKB mencari guru-guru yang berkualifikasi tinggi untuk mengajar disana caranya dengan mendatangkan guru-guru dari negeri Belanda atau mengirim pemuda untuk mengikuti pendidikan guru di Nederland¹⁴.

2.6. Tidak adanya Organisasi Sistematis

Sekitar tahun 1910 terdapat berbagai ragam sekolah rendah bagi anak-anak pribumi seperti Sekolah Desa di pedesaan, Sekolah Kelas Dua di kota-kota, Sekolah Kelas Satu untuk anak-anak kaum ningrat dan golongan kaya, sekolah khusus untuk anak militer juga untuk golongan Aristokrat di Sumatra dan sejumlah sekolah untuk pendidikan pegawai dan dokter Jawa. Ciri khas dari sekolah-sekolah ini ialah berdiri sendiri-sendiri tanpa hubungan antar organisasi dan tanpa jalan untuk melanjutkannya¹⁵. Contoh: seseorang yang telah lulus dari Sekolah Kelas Dua tidak dapat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Hal tersebut diatas menunjukkan PKB tidak mempunyai rencana yang komperhensif dan tampaknya menggunakan metode trial and error dengan senantiasa

¹⁴ S. Nasution, 1995, *op. cit.*, hlm., 96.

¹⁵ *Ibid.*, hlm., 32.

mengadakan perubahan menurut keadaan jaman. Pada umumnya mereka menciptakan tipe sekolah tertentu yang berkembang dan bergerak dalam rangka keterbatasan biaya, sehingga hanya menyediakan pendidikan yang sederhana bagi rakyat kecil dan pendidikan yang baik kepada golongan elit pribumi.

3. Kesimpulan

Politik pendidikan adalah kebijaksanaan atau cara bertindak PKB bagi anak-anak pribumi dalam bidang pendidikan. Penerapan pola pendidikan Belanda ini bersifat dualisme artinya ada dua sistem pendidikan yang ditujukan bagi anak-anak Belanda dan anak-anak pribumi. Dualisme sistem pendidikan ini bertujuan untuk menghambat kemajuan pendidikan bagi anak-anak pribumi agar tidak setara dengan anak-anak Belanda.

Cara-cara politik pendidikan Belanda yang pertama adalah gradualisme yaitu PKB sangat lamban melakukan perubahan pendidikan karena alasan keterbatasan dana dan ketakutan akan gerakan massa yang didasari oleh sentimen agama. Kedua adalah dualisme yaitu membedakan secara rasial dan sosial dengan alasan adanya kebutuhan yang berbeda dari tiap-tiap tingkatan sosial masyarakat. Ketiga adalah kontrol sentral yang kuat artinya masalah pendidikan tidak akan mengalami perubahan apabila tidak ada persetujuan dari Gubernur Jenderal atau Direktur Pendidikan yang bertindak atas nama PKB. Hal ini menunjukkan tidak adanya peran pribumi dalam menentukan kebijakan pendidikan di Hindia Belanda. Keempat adalah adanya keterbatasan tujuan dimana penyediaan pegawai menjadi ukuran keberadaan jumlah sekolah yang ada artinya kalau tidak ada kebutuhan pegawai maka jumlah sekolah harus dikurangi karena kelebihan golongan intelektual akan menimbulkan ketidakseimbangan politik dan sosial. Kelima adalah prinsip konkordansi yang bertujuan menjaga agar sekolah-sekolah di Hindia Belanda mempunyai kurikulum dan standart yang sama dengan sekolah-sekolah di Belanda. Prinsip ini hanya untuk sekolah-sekolah yang ditujukan bagi anak-anak Belanda sedangkan bagi anak-anak pribumi tidak diberlakukan

standarisasi seperti itu dengan alasan keterbatasan dana. Keenam adalah tidak adanya perencanaan sistem pendidikan yang sistematis artinya masing-masing sekolah berdiri sendiri tanpa adanya hubungan antar organisasi pendidikan dan tanpa jalan untuk melanjutkannya. Prinsip ini tentu saja sangat menghambat perkembangan pendidikan anak-anak pribumi, walaupun kenyataannya ada peningkatan ekonomi dan sosial masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Burger, D. H. *Sejarah Ekonomis Sosiologis Indonesia II*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1970.
- Edi Sedyawati, et. al. *Sejarah Pendidikan di Indonesia Sebelum Kedatangan Bangsa-Bangsa Barat*. Jakarta: Departemen P dan K. 1991.
- Hasbullah. *Sejarah Pendidikan di Indonesia: Lintasan Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangannya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- I. Djumhur dan Dana Suparta. *Sejarah Pendidikan*. Bandung: CV. Ilmu. 1959.
- Mardanas Sofyan, et. al. *Sejarah Pemikiran Pendidikan dan Kebudayaan*. Jakarta: Departemen P dan K. 1986.
- Moestoko Soemarsono, et. al. *Pendidikan di Indonesia dari Jaman ke Jaman*. Jakarta: Balai Pustaka. 1985.
- Muh. Said. *Pendidikan Abad Keduapuluh Dengan Latar Belakang Kebudayaannya*. Jakarta: Mutiara. 1981.
- Ricklefs, M.C. *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta: Gajah Mada University Pers. 1993.
- Sartono Kartodirdjo. *Elit dalam Prespektif Sejarah*, Jakarta: LP3ES. 1982.
- Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Nasional Indonesia II*. Jakarta: Departemen P dan K 1975.
- Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Departemen P dan K 1975.

Sartono Kartodirdjo. *Sejarah Nasional Indonesia IV*. Jakarta: Departemen P dan K 1975.

S. Nasution. *Sejarah Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara 1995.

S. Sudarmadi. *Pendidikan Non Formal Dalam Rangka Pengembangan Sumber Tenaga Mega*. Jakarta: Prisma. 1973.

Soetedja Bradjanegara. *Sejarah Pendidikan Indonesia*. Yogyakarta: t. p. 1956.

Sutherland, Heather. *Terbentuknya Sebuah Elit Birokrasi*. Jakarta: Sinar Harapan. 1983.

Van Niel, Robert. *Hancurnya Elit Modern*. Jakarta: Pustaka Jaya. 1984.

